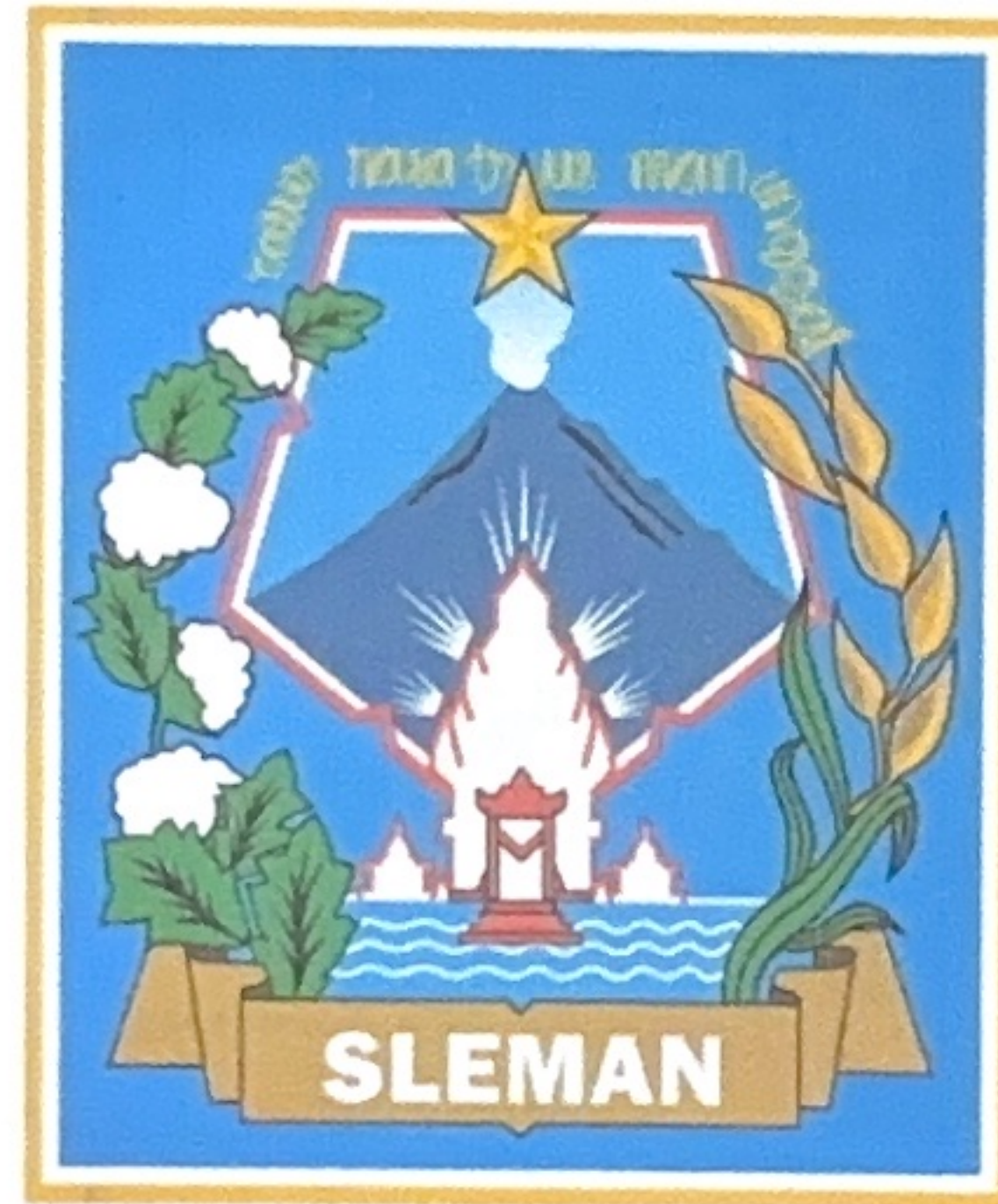


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SLEMAN

Nomor SOP	202/048/XII/2025
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	31 Desember 2025
Pengesahan	Lurah Pandowoharjo  Catur Sarjumi Harta

Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penguji Konsekuensi
----------	---

Kualifikasi Pelaksana

Pendidikan	: minimal S1
------------	--------------

Peralatan/Perlengkapan

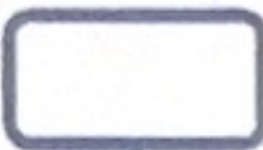
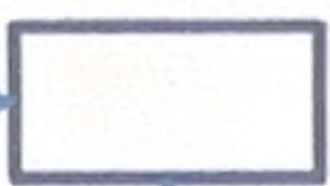
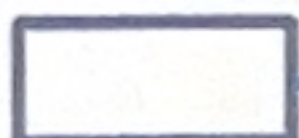
1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
3. Komputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Telepon

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik

Peringatan

Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan
--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Atasan PPID (Lurah)	PPID Kalurahan	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2		3	4	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID (baik atas usulan perangkat desa maupun atas permohonan dari pemohon informasi)				(1) Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon (2) Usulan dari perangkat desa (3) Daftar Informasi Publik	Setiap hari kerja	Notulen Rapat	
2	Memberikan pertimbangan dan masukan kepada PPID atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi)				UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setiap hari kerja	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
3	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi					Setiap hari kerja		
4	Menerbitkan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan					Setiap hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	Menggandakan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPID Kalurahan dan dijadikan dasar dalam pelayanan informasi publik				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja		